

RINGKASAN

Mayndha Yulista Sitorus **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP JURNALIS DALAM KONTEKS
KEBEBASAN PERS** (Studi Putusan Nomor:
148/Pid.Sus/2021/Pn.Lgs)

**(Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H. dan Nuribadah
S.H.,M.H.)**

Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks kebebasan pers. Meskipun Undang-undang Pers menjamin kebebasan bagi jurnalis, pada praktiknya mereka sering terjerat dalam kasus pencemaran nama baik yang dipidana berdasarkan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), seperti yang terjadi dalam Putusan No. 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap Jurnalis dalam konteks kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.sus/2022/PN.Lgs serta memahami apa akibat hukum yang ditimbulkan jurnalis dalam memperoleh perlindungan hukum terkait kebebasan pers terhadap Putusan Nomor: 148/Pid.Sus/2021PN.Lgs.

Metode penelitian ini berjenis kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Selanjutnya sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta analisis secara perspektif-normatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perkara Nomor 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs mencerminkan lemahnya implementasi perlindungan hukum bagi jurnalis di Indonesia. T. Syafrizal dipidana menggunakan Pasal 27 ayat (3) Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tanpa melalui mekanisme Dewan Pers. Akibat hukum yang timbul yaitu T. Syafrizal dipidana menggunakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) karena pernyataannya di media sosial tidak dianggap sebagai produk jurnalistik yang mendapat perlindungan Undang-undang Pers. Hal ini menegaskan pentingnya mematuhi prosedur jurnalistik agar kebebasan pers tetap terlindungi.

Disarankan kepada hakim perlu memastikan pernyataan terdakwa termasuk aktivitas jurnalistik yang sah, menyeimbangkan kebebasan pers dan perlindungan nama baik, serta mengarahkan sengketa ke Dewan Pers bila perlu. Kepada jurnalis, diharapkan selalu melaksanakan profesinya sesuai dengan kode etik jurnalistik.

Kata Kunci: *Implementasi, Perlindungan Hukum, Jurnalis, Kebebasan Pers*

SUMMARY

Mayndha Yulista Sitorus
Nim.210510075

IMPLEMENTATION OF LEGAL PROTECTION FOR JOURNALISTS IN THE CONTEXT OF PRESS FREEDOM (Study of Decision Number: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs)

(Dr. Elidar Sari, S.H.,M.H. and Nuribadah S.H.,M.H.)

Implementation of legal protection of journalists in Indonesia is still problematic, particularly in the area of press freedom. Despite the fact that the Press Act protects journalists' freedom, in reality they are frequently caught up in criminal defamation cases that are prosecuted under the ITE Law, as happened in Decision No. 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs. This study aims to examine the implementation of legal protection for journalists in the context of press freedom in relation to Court Decision Number: 148/Pid.Sus/2021/PN.Lgs, and to understand the legal implications experienced by journalists in obtaining such protection under the framework of press freedom.

The research employs a qualitative legal approach with a normative juridical method, incorporating both statutory and case-based approaches. The sources of legal material used in this study include primary, secondary, and tertiary legal sources, analyzed through a normative-perspective analysis.

The research shows that Case Number 148/Pid. Sus/2021/PN. Lgs highlights the weak legal protection for journalists in Indonesia. T. Syafrizal was punished under Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law without going through the Press Council. His statements on social media were not seen as journalistic work, which did not receive protection under press laws. This situation emphasizes the importance of following journalistic procedures to protect press freedom.

Judges should verify if the defendant's statements are legitimate journalistic activities, balance press freedom with reputation protection, and refer disputes to the Press Council when needed. Journalists are encouraged to adhere to journalistic ethics in their work.

Keywords: *Implementation, Legal Protection, Journalists, Press Freedom*